

PERAN PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA BATAM

George Rudi Hartono Pasaribu

Sekolah Tinggi Teologi Tabgha Batam

george@st3b.ac.id

Abstrak

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat ras dan keyakinan adalah sebuah kekayaan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain tetapi disatu sisi bisa menjadi ancaman perpecahan jika perbedaan-perbedaan ini tidak dirawat dengan pemahaman-pemahaman yang baik khususnya dalam pemahaman moderasi beragama. Nilai-nilai toleransi antar umat beragama dapat dikembangkan dengan pemahaman beragama yang moderat, Pejabat Gereja Bethel Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan sekaligus sebagai gereja yang bernafaskan nasional memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi kepada warga jemaat, warga masyarakat dan sekaligus dapat menjadi motor dalam penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dasar dan pemahaman bagaimana pejabat GBI dapat berperan secara aktif, inklusif dan praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang disebut penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana gejala-gejala atau fenomena yang diteliti dikumpulkan secara jelas kaitannya dengan sifat-sifat atau objek yang diteliti. Untuk itu keseluruhan proses penggunaan teknik analisis data hasil penelitian sastra dilakukan dengan mencari berbagai sumber informasi baik berupa buku, majalah dalam dan luar negeri, artikel dan sumber pustaka lainnya. Pada praktisnya, hal ini diwujudkan dalam bentuk kesadaran dan penerimaan terhadap perbedaan suku atau ras dengan cara mengkhotbahkan atau mengajarkan kepada jemaat perlunya memahami moderasi dalam beragama, pelestarian dan penerapan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya pemahaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, agar seluruh pengurus GBI memahami bahwa perbedaan adalah harta bangsa, kemudian mengembangkan budaya inklusif dengan tindakan nyata seperti kegiatan diskusi bersama, kerjasama, melaksanakan kegiatan sosial bersama antar komunitas dan antara gereja dan komunitas.

Kata kunci: Moderasi beragama, Penguatan, Toleransi, GBI, Kementerian Agama

Abstract

Indonesia, consisting of various ethnicities, customs, races, and beliefs, is a richness not possessed by other nations. However, on one hand, it can pose a threat of division if these differences are not nurtured with good understanding, especially in the understanding of religious moderation. The values of tolerance among religious communities can be fostered through a moderate religious understanding. Indonesian Bethel Church as part of society and also a church with a national spirit, play a crucial role in educating congregation members and the broader community. They can also serve as a driving force in strengthening religious moderation. Therefore, a foundation and understanding of how GBI can actively, inclusively, and practically contribute to achieving this goal are needed. This research employs a method known as descriptive research with a qualitative approach, where the phenomena or issues being examined are obtained clearly in terms of their characteristics or objects. In the overall process, data analysis techniques are used on the literature review's findings, which are conducted by exploring various sources of information such as books, national and international journals, articles, and other literature sources. In practice, it can be seen through the awareness and acceptance of ethnic or racial differences by preaching or teaching congregants about the importance of understanding religious moderation, preserving and applying the noble values of the Indonesian nation, namely "Bhineka Tunggal Ika" (Unity in Diversity). Additionally, providing understanding to all officials of GBI that differences are a national wealth, developing inclusivism as an Indonesian cultural trait through concrete actions like joint discussions, mutual cooperation, engaging in social activities together among communities and between churches and the community.

Keywords: Religious moderation, strengthening, tolerance, GBI (Indonesian Bethel Church), Ministry of Religious Affairs.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku dan etnis. Hal ini mengacu pada

kenyataan bahwa Indonesia adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dengan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Terdapat lebih dari

300 suku bangsa di Indonesia, faktor geografis dan sejarah memainkan peran penting dalam membentuk keberagaman etnis di Indonesia. Berbagai pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki kelompok etnis yang unik. Mereka membawa warisan budaya dan tradisi yang beragam. Keanekaragaman etnis ini juga tercermin dalam beragamnya bahasa yang digunakan di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa persatuan yang dipahami oleh mayoritas penduduk, namun terdapat banyak bahasa daerah dan suku bangsa yang digunakan sehari-hari.

Penting untuk diingat bahwa keberagaman etnis adalah salah satu kekayaan besar Indonesia. Hal ini memperkaya budaya, seni, dan tradisi negara ini. Namun, juga penting untuk mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan persatuan di tengah perbedaan. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa keberagaman etnis menjadi kekuatan positif dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Keberagaman tersebut disatukan oleh beberapa pilar kebangsaan yang dimiliki oleh negara, pilar nasional tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dijelaskan secara mendalam dalam buku Sutasoma karya Mpu Tantular. Sutasoma merupakan karya sastra terbesar tentang Bhinneka Tunggal Ika, sehingga pembahasannya akan mengacu pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 dalam konsiderannya mengatakan: "bahwa keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; bahwa moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sehingga perlu penguatan moderasi

beragama. (Kementerian Sekretariat Negara RI 2023, 1)

Nilai-nilai itu sendiri menurut KBBI adalah: sifat atau hal yang penting atau berguna bagi umat manusia. Pada saat yang sama, Schwartz dan Bilsky menawarkan definisi konseptual tentang nilai : (a) merupakan suatu konsep atau keyakinan, (b) berkaitan dengan keadaan akhir atau perilaku yang diinginkan, (c) mengatasi situasi tertentu, (d) memandu pilihan atau evaluasi perilaku dan peristiwa, dan (e) diurutkan berdasarkan kepentingan relatifnya. Jika dimulai dari memahami nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah sepatutnya kita menjadikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan untuk membangun keberagaman yang ada di Indonesia. Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik dan berguna bagi manusia. Nilai merupakan suatu apresiasi atau kualitas terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentuan perilaku manusia. (Winarno 2019, 127) Nilai-nilai inti keberagaman, khususnya keberagaman suku dan ras adalah membangun keberagaman inklusif, kesadaran multikultural, membangun sikap sensitif gender, dan membangun toleransi.

Menurut Kaelan, sila ketiga Pancasila mengandung makna penting berdirinya bangsa dan negara Indonesia sebagai suatu proses dinamis penyatuan daerah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan 34 provinsi. (Kaelan 2013) Sebagai bangsa yang besar dengan bentangan wilayah 1.919.317 Km² dan 17.500 pulau yang terhampar sejauh 9.5 juta Km² di dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, Waruwu mengatakan Sila ketiga dari Pancasila diyakini mampu mengikat setiap golongan atau kelompok dalam kesatuan sebagai masyarakat yang berkarakter. (Waruwu, Wijanarko, and Harmadi 2022)

Melalui Kementerian Agama, pemerintah Indonesia mencanangkan program yang disebut moderasi beragama. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, Kementerian terus mempublikasikan pentingnya program ini di semua tingkatan, baik organisasi horizontal maupun kemasyarakatan. Dalam paparannya, Menteri Agama saat

itu mengatakan: Moderasi beragama “harus menjadi norma dalam pembangunan Indonesia.” Pentingnya peraturan keagamaan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019)

Rencana pemerintah tersebut sangat sesuai dengan kondisi Indonesia. Fenomena pluralisme dan maraknya kelompok ekstremis atau fundamentalis yang kepatuhannya terhadap agama cenderung menimbulkan intoleransi dan konflik antar umat beragama. Masyarakat Indonesia sudah lama mempunyai cerita kelam tentang konflik SARA. Tercermin di media nasional, sejumlah pihak terus mempertanyakan Pancasila, dipicu oleh isu penistaan agama dan kekerasan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa agenda moderasi beragama sangat kontekstual di Indonesia. (RI 2020)

Sebagai contoh, pada tahun 2022 di Kota Batam diberitakan bahwa ada masalah penolakan pembangunan rumah ibadah Gereja HKBP Sei Langkai Kota Batam, pada akhirnya berakhir damai dan baik setelah di fasilitasi oleh berbagai pihak baik dari unsur pemerintah, FKUB, TNI, Polri unsur masyarakat dan tokoh Agama, Ketua FKUB Kota Batam Chablullah Wibisono, mengatakan, Permasalahan ini telah beberapa kali dibahas dan diadakan pertemuan dan hingga saat ini belum selesai juga. Semua agama mengajarkan saling menyayangi dan mengasihi sesama umat beragama. Jangan sampai dari permasalahan ini ada pihak-pihak yang menggiring ke ranah politik. Baru-baru ini diberitakan perihal pengrusakan Gereja di kota Batam, Kompas melaporkan “Sekelompok warga di Batam, Kepulauan Riau diduga merusak bangunan yang akan digunakan untuk Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI). Polisi menegaskan masalah itu dipicu persoalan lahan dan bukan konflik agama”. (Kompas.com 2023) Kabidhumas Polda Kepri mengatakan: Kesepakatan yang dicapai dalam audiensi/mediasi ini menunjukkan semangat kedamaian dan toleransi dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan berbagai pihak. Diharapkan bahwa langkah-

langkah konstruktif ini akan terus berlanjut untuk memperkuat kerukunan dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta kondusif di Kota Batam. (Kepri 2023) Harapan dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan contoh kasus yang terjadi di Kota Batam adalah alasan yang sangat kuat mengapa moderasi beragama penting untuk dipahami dan dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pendekatan moderat dalam Kehidupan Keagamaan, untuk menyelidiki dan menganalisis pendekatan moderasi beragama yang diadopsi oleh Gereja Bethel Indonesia di Kota Batam melalui para pejabatnya, yang meliputi pendekatan teologis dan sosiologis yang mendorong toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kerjasama antaragama. (2) kemudian untuk mempromosikan dan mendukung dialog konstruktif antara Gereja dan komunitas agama lainnya. Ini bisa meliputi analisis terhadap inisiatif dialog, program kerja sama antaragama, dan upaya untuk membangun pemahaman saling di antara penganut berbagai agama. Pada akhirnya melalui penelitian tentang moderasi beragama dapat mempromosikan nilai-nilai inklusif, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman di dalam komunitas keagamaan.

Moderasi Bergama Di Indonesia

Gelombang radikalisme atau fundamentalisme agama yang berujung konflik dan kekerasan terus merebak sekian tahun ini di dunia termasuk Indonesia. Konflik tersebut begitu rawan terutama dalam konteks Indonesia yang begitu majemuk. Hal tersebut bisa mencabik-cabik dan memecah belah keutuhan bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Nolan mencatat bahwa fundamentalisme bisa ada dalam beragam agama entah Kristen, Islam, Hindu, Budha ataupun yang lainnya. Dalam arti yang mengawatirkan, fundamentalisme kerap memiliki kepentingan politis untuk merebut kekuasaan. Kelompok militan, khususnya di Indonesia, sengaja mengambil keuntungan dari fundamentalisme agama. Kelompok ini mencari dukungan rakyat

atas kemenangan yang seringkali berakhir dengan kekerasan dan teror demi keuntungan mereka sendiri. Dalam konteks Indonesia, radikalisme yang menimbulkan intoleransi merupakan ancaman terhadap keutuhan tatanan negara. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi alternatif nyata bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. (Nolan 2009)

Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan buku berjudul "Moderasi Beragama" pada tahun 2019, buku tersebut menekankan bahwa keberagaman dan keberagaman di Indonesia merupakan anugerah Tuhan. Keberagaman ini harus diterima (*taken for grant*) dan bukan dinegosiasikan. Keberagaman agama, kepercayaan, suku, suku, bahasa dan budaya menunjukkan bahwa Indonesia sungguh kaya dan indah. Penulis semakin menyadari bahwa kesalahan pengelolaan keberagaman dan sedikit fanatisme yang berpikiran sempit dapat mengancam persatuan bangsa. Moderasi beragama menjadi harapan semua pihak untuk bersinergi membangun kerukunan dan perdamaian di tengah perbedaan.

Indonesia adalah negara kesatuan, ditandai dengan keberagaman yang besar, menggabungkan banyak kebangsaan, dialek, agama, identitas dan komunitas yang berbeda. Keberagaman dapat menciptakan keutuhan yang mengikat masyarakat, namun juga dapat menimbulkan konflik antar masyarakat, ras, kebangsaan, agama, dan nilai-nilai kehidupan. Karena keberagaman tersebut, Indonesia mempunyai semboyan Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang majemuk, untuk menjaga solidaritas masyarakat, diperlukan moderasi beragama agar tidak terjadi praktik-praktik keburukan yang dapat memecah belah bangsa. (Hendriani et al. 2021, 1)

Argumen penting mengenai hadirnya moderasi beragama dalam konteks Indonesia adalah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralistik dan multikultural. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman yang ada, menurut hukum alam, akan menimbulkan gesekan bahkan konflik antar masyarakat,

jika tidak dilandasi keseimbangan dalam memahami setiap perbedaan yang terjadi. (Ali Muhtarom & Sahlul Fuad (eds.) 2020, 8)

Akar kata moderasi berasal dari kata latin "*moderation*". Kata ini mempunyai arti sedang atau tidak lebih dan tidak kurang, dapat juga diartikan secukupnya, wajar, tanpa kekurangan atau bisa disebut seimbang. Moderasi juga melibatkan kebijaksanaan baik dari kelebihan maupun kekurangan. (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019, 15)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lebih mengartikan moderasi dalam kaitan dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstremisan. (KBBI 2008) Moderasi beragama dapat berarti cara pandang dan sikap yang dipilih untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Moderasi beragama menuntut umatnya untuk tidak bersikap ekstrem dalam urusan keagamaan. Pemahaman ini sekali lagi menegaskan bahwa ekstremisme adalah visi dan gerakan yang berbahaya. Pemahaman ini hanya menggunakan satu cara pandang dan subjektivitas tentang kebenaran. Orang-orang ini cenderung menganggap dirinya benar, sementara orang lain salah. Sikap ini merupakan ancaman langsung terhadap persatuan di tengah keberagaman keyakinan.

Moderasi beragama adalah pendekatan atau sikap yang menekankan pada pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar penganut berbagai kepercayaan dan agama. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dialog yang saling menghormati, mengurangi konflik, dan membangun harmoni antar umat beragama. Moderasi beragama juga dapat melibatkan usaha untuk menghindari ekstremisme atau fundamentalisme agama, serta mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, perdamaian, dan persamaan.

Penting untuk dicatat bahwa moderasi beragama tidak bermaksud untuk memadukan atau mengaburkan perbedaan kepercayaan agama, tetapi lebih pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dan hak setiap individu untuk memilih dan

mempraktikkan agamanya masing-masing.

Dalam konteks sosial dan politik, moderasi beragama juga dapat mengacu pada usaha untuk mempromosikan kebijakan atau tindakan yang menghormati kebebasan beragama dan menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai komunitas keagamaan. Ini dapat mencakup penyusunan kebijakan publik, legislasi, atau pendekatan komunitas untuk memastikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia dihormati dan terlindungi.

Kementerian Agama RI terus berupaya mendorong praktik moderasi beragama. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat “pandangan, sikap dan praktik keagamaan jalan tengah”. Artinya, memilih sikap toleran di tengah keberagaman dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam nusantara adalah hal yang penting, yang kemudian ditekankan dalam RPJMN 2020-2024 pada beberapa poin. Kementerian Agama sendiri memfokuskan permasalahan tersebut dalam visi yang tertuang dalam Restra 2020-2024. Visinya adalah “Departemen Agama yang profesional dan amanah dalam membangun masyarakat yang bertaqwa, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan masyarakat yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.” (Kementerian Agama RI 2020, 65)

Dalam membangun masyarakat yang moderat, saleh, beradab, dan unggul merupakan produk berupa masyarakat yang taat, ikhlas beribadah, selalu menghindari perilaku atau manifestasi ekstrim dan mengarahkan pada jalan tengah, menuju kesempurnaan, mengembangkan kecerdasan (berpikir, memahami, dll.) dan menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih mampu. Yang dimaksud dengan “mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah masyarakat yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas akan turut mewujudkan visi Presiden Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan bangsa yang maju, Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berorientasi pada kepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, pencapaian Visi ini akan berkontribusi pada Visi Pendidikan Indonesia 2025 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 “Membangun Daya Saing Indonesia Cerdas dan Berkemampuan (Insan Kamil/Insan Keseluruhan)”. (Kementerian Agama RI 2020, 65)

Gereja Bethel Indonesia

Gereja Bethel Indonesia (disingkat GBI) adalah kumpulan atau jemaat gereja-gereja Kristen Protestan di Indonesia, anggota Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). Resmi berdiri pada tanggal 6 Oktober 1970, di Sukabumi, Jawa Barat. Pdt. H.L. Senduk (Ho Liong Seng) dan rekan-rekannya mendirikan organisasi gereja baru bernama Gereja Bethel Indonesia (GBI). H.L. Senduk awalnya bergabung dengan organisasi GPdI namun terpecah dan mendirikan (GBI). Gereja ini diakui secara resmi oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 tanggal 9 Desember 1972. GBI merupakan gereja nasional yang beranggotakan ribuan jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana setiap jemaat mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan dan menjalankan sistem pemerintahan di setiap gereja lokal. Sifat keberagaman yang ada di GBI tentu saja bermula dari pengalaman panjang para pendiri GBI. Para pendiri Gereja, yang mencakup banyak orang dari berbagai latar belakang, termasuk ras, etnis, kelas sosial, dan beberapa profesional yang ada seperti pendeta, dokter, cendekiawan, pengusaha, dan kegiatan pemerintahan, juga mempengaruhi keberadaan GBI. (GBI 2014)

Gereja Bethel Indonesia di Kota Batam

Di Kota Batam, Gereja Bethel Indonesia terdiri dari 130 jemaat Lokal dengan jumlah Anggota 40.516, dibawah naungan Badan Pengurus Daerah Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia dengan alamat kantor sekretariat berada di Kota Batam, Komp. Ruko Batam

Executive Center Blok F, No:10-11 Laksamana Bintan - Sei Panas, Kota Batam Kepulauan Riau, dirintis pertama tahun 1991 Gereja-gereja GBI pada awalnya secara teritori masih ada dibawah keanggotaan BPD Riau daratan yang berpusat di Pekanbaru. Namun dengan perkembangan yang pesat, munculnya cabang-cabang baru dan berkembangannya perintisan baru dari hamba-hamba Tuhan GBI, maka mulailah terpikirkan untuk membentuk BPD Kepulauan Riau. (Sekretariat Badan Pengurus Daerah Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang disebut penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana gejala-gejala atau fenomena yang diteliti dikumpulkan secara jelas kaitannya dengan sifat-sifat atau objek yang diteliti. Untuk itu keseluruhan proses penggunaan teknik analisis data hasil penelitian sastra dilakukan dengan mencari berbagai sumber informasi baik berupa buku, majalah online, jurnal luar negeri, dan dalam negeri maupun artikel dan sumber perpustakaan lainnya. Selanjutnya dilakukan proses pengklasifikasian hasil yang diperoleh dengan memfokuskan pada kriteria pendukung untuk mengungkap makna moderasi beragama dan kesesuaiannya dengan peran GBI dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama sudah menjadi salah satu ketetapan pemerintah yang harus dihidupi oleh seluruh warga negara. Moderasi beragama telah menjadi program resmi Kementerian Agama yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019. Moderasi beragama menjadi penting dalam konteks dimana gesekan atau konflik antar agama semakin mungkin terjadi. Konflik identitas etnis dan agama nampaknya semakin parah, terutama seiring dengan persoalan kesenjangan ekonomi dan sosial serta kepentingan politik yang mewarnai kehidupan berbangsa. Fenomena konflik yang mempunyai makna keagamaan

muncul silih berganti, baik dalam konteks keberadaan tempat ibadah, cara ibadah, maupun dalam konteks konsep paham keagamaan, hal ini terjadi baik di dalam suatu agama maupun di kalangan pemeluk beda agama. Kemudahan penyebaran informasi, ditambah dengan perkembangan media saat ini, membuat siapapun dapat dengan mudah mengkonsumsi informasi dalam bentuk apapun tanpa adanya filter yang tepat, di sisi lain, setiap orang dapat dengan bebas berekspresi dan mengumpulkan informasi tanpa pengawasan di ruang media. Oleh karena itu, kehidupan berbangsa di negara yang majemuk menjadi semakin rentan terhadap konflik. Untuk memenuhi kondisi tersebut, Gereja sebagai perkumpulan umat beriman mempunyai tanggung jawab sosial dan spiritual untuk mampu mengatasi permasalahan yang ada di negeri ini.

Prinsip dasar moderasi beragama yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan sikap adil dan seimbang. Dengan prinsip inilah setiap orang beragama dituntut untuk berada pada posisi titik tengah, bukan pada titik ekstrim pandangan, pengajaran maupun tindakan. Prinsip dasar ini secara esensial memuat tujuan dasar persatuan, kerukunan dan kedamaian dalam berkehidupan. Dan memang untuk tujuan dasar itulah yang menjadi arah tujuan moderasi beragama ditetapkan. Dengan demikian moderasi beragama nanti bukan lagi sebatas konsep dan tindakan namun dapat menjadi karakter berbangsa karena menjadi salah satu budaya dalam hidup berbangsa. Kelangsungan hidup bangsa ini bertumpu kepada moderasi beragama karena melaluinya keharmonisan dan keselarasan hidup berbangsa dapat terawat dan tercipta kedamaian. Perdamaian adalah kunci pembangunan dan keberlanjutan suatu negara dan masyarakat. Moderasi beragama mempunyai banyak manfaat penting di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman agama dan kepercayaan.

Beberapa alasan mengapa moderasi beragama penting di Indonesia:

1. Menciptakan Keamanan dan Stabilitas:
Moderasi beragama membantu

mencegah potensi konflik antar kelompok agama. Dengan mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, ini dapat mengurangi risiko konflik antar umat beragama yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.

2. Mempromosikan Kerukunan Sosial:

Moderasi beragama memungkinkan masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda-beda keyakinan. Ini menciptakan iklim kerukunan sosial yang positif dan mendukung perkembangan komunitas yang inklusif.

3. Mendorong Keadilan dan Kesetaraan:

Moderasi beragama memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan mempraktikkan agamanya tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak untuk memilih untuk tidak memiliki agama atau kepercayaan tertentu.

4. Menjaga Reputasi Global:

Moderasi beragama dapat membantu menjaga reputasi Indonesia di mata komunitas internasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia membuat pendekatan moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting untuk mengangkat posisi Indonesia dimata global, sekaligus memperlihatkan bahwa faktor perbedaan Agama tidak lagi jadi penghalang bagi pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa.

5. Menghindari Ekstremisme dan Radikalisasi:

Moderasi beragama adalah alat efektif untuk mengatasi potensi ekstremisme dan radikalisme. Dengan mempromosikan interpretasi agama yang toleran dan terbuka, masyarakat lebih cenderung terhindar dari terjebak dalam ideologi radikal.

6. Memperkuat Identitas Bangsa:

Moderasi beragama dapat memperkuat identitas nasional dan persatuan di Indonesia. Hal ini karena pendekatan ini mengajarkan nilai-nilai keberagaman sebagai bagian integral dari identitas Indonesia.

7. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan:

Moderasi beragama juga dapat berdampak positif pada pembangunan ekonomi dan sosial. Iklim yang stabil dan damai mendukung pertumbuhan ekonomi,

pariwisata, dan investasi, yang semuanya penting untuk kemajuan negara.

8. Memperkuat Kedudukan Negara Bhinneka Tunggal Ika:

Motto nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika" (Berbeda-beda tapi tetap satu), mencerminkan semangat keberagaman yang mengakar dalam budaya Indonesia. Moderasi beragama adalah wujud dari semangat ini, menunjukkan bahwa perbedaan keagamaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Dengan mempromosikan moderasi beragama, Indonesia dapat membangun masyarakat yang inklusif, damai, dan berkeadilan, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan dan kesejahteraan kota dan bangsa.

Dalam upaya penguatan moderasi Agama tidak hanya berada dipundak kementerian Agama saja, tetapi semua komponen masyarakat-pun haruslah mengambil bagian di dalamnya. Dalam Perpres No 58 tahun 2023, pada pasal 8 dituliskan: (1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain. (Kementerian Sekretariat Negara RI 2023, 5). Dari perpres di atas dapat dipahami bahwa Pejabat Gereja Bethel Indonesia sebagai bagian masyarakat dapat berperan dalam penguatan moderasi beragama.

Peran Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di Kota Batam

Dalam Tata Gereja, Gereja Bethel Indonesia pada Pasal 18 tentang Pejabat GBI menjelaskan bahwa: Pejabat GBI adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki karunia pelayanan yang berfungsi antara lain sebagai: rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang membangun jemaat (Efesus 4:11: Roma 12:6-8, 1 Korintus 12:29-30). Jenjang kepejabatatan GBI terdiri dari: Pendeta Pratama disingkat Pdp., Pendeta Madya disingkat Pdm. dan Pendeta disingkat Pdt. (Efesus 4:11-12). (Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia 2021, 21) dengan landasan Gereja dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebab itu peranan Pejabat GBI dalam moderasi beragama sangat penting dalam mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kerjasama antaragama.

Dalam Injil Matius 5:13-16 Yesus menggunakan metafora garam dan terang untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab umat-Nya, termasuk Gereja, di dunia. (LAI 1997) Dalam ajaran ini, garam dapat dimaknai sebagai yang memberi rasa dan mengawetkan, garam dalam konteks ini menggambarkan kemampuan umat Kristen, termasuk Gereja, untuk mempengaruhi dan memperkaya dunia. Seperti halnya garam memberi rasa pada makanan dan mengawetkannya, Gereja diharapkan memberi "rasa" atau pengaruh positif pada masyarakat di sekitarnya. Terang adalah simbol pengetahuan, kebenaran, dan pencerahan. Gereja diharapkan untuk menyebarkan kebenaran Injil dan memberikan petunjuk moral dan rohani bagi umat manusia, ini termasuk mengamalkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, keadilan, dan belas kasihan dalam interaksi sehari-hari.

Dari metafora di atas maka, langkah awal Pejabat GBI dapat berperan dalam moderasi beragama adalah menjadi pejabat yang inklusif, yaitu pejabat yang mampu berbaur dan memandang setara warga masyarakat yang berbeda-beda dalam suku, adat, ras dan agama, kemampuan ini tidak terbatas pada pemahaman etimologis tetapi dapat diwujudkan praktikan dalam kehidupan sehari-hari dimana ia berada, ini adalah langkah awal penting sehingga Pejabat GBI dapat memainkan peranannya untuk mengkomunikasikan, mempromosikan dan memengaruhi masyarakat yang berbeda latar belakang dengan pemahaman-pemahaman yang moderat dalam beragama di Indonesia, dengan komunikasi sekaligus akan mempersempit gerak prasangka, curiga, kecemburuan sebaliknya memperkuat hubungan diantara masyarakat.

Komunikasi sebagai alat terjadinya pertemuan harus didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran yang tulus, serta keberanian untuk masuk

dalam komunitas masyarakat yang multikultural. Salah satu bentuk komunikasi dalam proses pembauran yaitu dialog dalam kerja sama untuk membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat dalam bidang sosial yang fokus terhadap usaha ini. Selain juga pengembangan sikap toleransi yang dibangun melalui falsafah yang berakar dari budaya masyarakat Indonesia dengan tradisi makan bersama seperti yang ditulis oleh Mariani tentang metafora meja makan. (Harmadi 2019)

Prinsip dasar dari moderasi beragama yang ditetapkan pemerintah adalah berkenaan dengan sikap berkeadilan dan keseimbangan. Dalam bingkai ini setiap orang beragama dituntut untuk berada pada posisi titik tengah, bukan pada titik ekstrim pandangan, pengajaran maupun tindakan. (Etnasari Anjaya and Arifianto 2021)

Dalam bukunya *Sikap Teologi GBI* yang membahas tentang hubungan antara Gereja dan Negara, ia menjelaskan: Gereja selalu memainkan peran penting di semua negara di dunia karena Gereja hidup di dunia ini. Dunia mengacu pada konteks di mana faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya berinteraksi dalam kehidupan umat Kristiani. Dengan bentuk pemerintahan negara yang berbeda-beda, Gereja ditantang mampu menunjukkan perannya di tengah masyarakat dalam melayani dunia dan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Sekalipun pesan Gereja tidak berubah, pendekatannya harus tetap dinamis, dialektis, dan kreatif. Fungsinya sebagai garam dan terang menghadapi realitas negara dan masyarakat, mulai dari yang opresif hingga yang responsif. Untuk menanggapi situasi dan konteks khusus ini, kajian tentang hubungan antara Gereja dan Negara sangat beragam, baik cakupan, dinamika dan kompleksitas. Sejak lahirnya Gereja hingga saat ini, belum ada konsensus mengenai bagaimana seharusnya Gereja bersikap dan menjalankan perannya di dalam Negara. Kekristenan tidak memiliki model politik yang ideal. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang negaranya berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum

dalam pembukaan UUD 1945, sehingga menjadikannya negara yang tidak berdasarkan agama tertentu, melainkan berdasarkan prinsip demokrasi. berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Negara mengakui kehadiran enam agama dan kepercayaannya. Gereja Bethel Indonesia terletak dalam konteks Indonesia sehingga pemahaman GBI tentang hubungan gereja dan negara perlu dijelaskan dan dipahami oleh seluruh jemaat GBI. (Departemen Teologi Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia 2018, 107)

Kesadaran akan keberagaman dan multikulturalisme diperlukan sebagai bagian dari pembentukan kesadaran akan kebhinekaan yang berujung pada penerimaan terhadap budaya lain dengan tujuan untuk menghormati dan melestarikan budaya masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. (Setyobekti, Kathryn, and Sumen 2021)

Alkitab memberikan berbagai panduan dan prinsip yang dapat membimbing peranan Pejabat GBI dalam upaya menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Efesus 4:31-32 (TB) menulis: "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Gereja diajarkan untuk hidup dalam kasih dan mengampuni, sehingga dapat membangun kerukunan di masyarakat. Efesus 4:3 (TB) Gereja dihibau untuk bekerja keras dalam mempertahankan persatuan rohaniah di dalam Tuhan, yang merupakan landasan bagi kerukunan masyarakat. Roma 12:18 (TB) Gereja diajarkan untuk menjauhi perbuatan yang dapat memicu konflik atau pertentangan, dan untuk mencari damai dengan semua orang. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya peranan Gereja dalam membantu menjaga kerukunan di dalam masyarakat melalui kasih, kebenaran, pengampunan, dan teladan perilaku yang baik. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, Gereja dapat berkontribusi secara inklusif, positif dalam memelihara kerukunan di antara warga masyarakat berbeda-beda keyakinan.

Berikut adalah beberapa peran utama Pejabat GBI dalam moderasi beragama:

1. Memberikan Teladan dan Membimbing Umat:

Pejabat GBI memiliki peran kunci dalam memberikan teladan kepada umatnya tentang bagaimana mempraktikkan agama dengan penuh kasih, toleransi, dan pengertian terhadap orang lain. Mereka dapat membimbing dan memberi contoh tentang bagaimana hidup secara harmonis dengan penganut agama lain. Hidup secara harmonis dengan penganut agama lain adalah suatu hal yang penting untuk membangun masyarakat yang toleran dan damai, memahami kekhasan agama dan kepercayaan orang lain dengan benar dan menekan friksi antar umat beragama, hal ini dapat dilakukan dengan berdiskusi, atau mengikuti kegiatan interkultural untuk membantu memahami nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda.

2. Mengajarkan Toleransi dan Penghargaan Terhadap Keberagaman:

Pejabat GBI dapat menggunakan pengajaran mereka untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penghormatan terhadap pilihan agama orang lain. Mereka dapat membantu umat memahami bahwa perbedaan agama adalah kekayaan, bukan ancaman. Memberikan pendidikan yang inklusif dan mengajarkan tentang toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan juga harus mencakup pengetahuan tentang agama dan budaya lain.

3. Mendorong Dialog Antaragama:

Pejabat GBI dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog konstruktif antara umatnya dengan komunitas agama lain. Mereka dapat mengorganisir pertemuan, seminar, atau forum diskusi yang memungkinkan orang untuk saling berbagi pandangan dan membangun pemahaman saling. Berkomunikasi dengan penganut agama lain dengan saling terbuka dan hormat. Tanyakan pertanyaan untuk memahami lebih baik tentang keyakinan mereka dan menghindari prasangka. Mengajak orang lain dari berbagai agama untuk berpartisipasi dalam acara atau kegiatan

yang bersifat inklusif, seperti pesta keagamaan atau festival budaya.

4. Menghadirkan Pelayanan Spiritual yang Inklusif:

Pejabat GBI dapat memastikan bahwa pelayanan rohaniah di gereja mereka bersifat inklusif dan terbuka untuk orang dari berbagai latar belakang keagamaan. Ini termasuk mempersiapkan liturgi atau ibadah yang memperhatikan keberagaman, dan memastikan bahwa semua umat merasa diterima. Pertahankan sikap terbuka dan responsif terhadap perbedaan, bersedia untuk belajar dari orang lain dan memperkaya pengalaman. Mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dapat membantu memperluas wawasan dan membangun hubungan yang lebih kuat.

5. Mengatasi Potensi Ekstremisme dan Fanatisme:

Pejabat GBI memiliki tanggung jawab untuk mengajar umat mereka tentang bahaya ekstremisme dan fanatisme agama. Mereka dapat membantu memberi pemahaman bahwa ajaran agama seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk membenarkan kekerasan atau intoleransi. Meminta dukungan dari pemimpin agama dan anggota masyarakat sipil untuk mempromosikan toleransi dan membimbing umat mereka menuju pemahaman yang lebih baik tentang pluralisme, mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam kegiatan yang mempromosikan inklusivitas dan mengurangi ketegangan sosial.

6. Menyediakan Bimbingan untuk Mengatasi Konflik Beragama:

Ketika konflik antaragama muncul, Pejabat GBI dapat berperan sebagai penengah atau konselor untuk membantu pihak-pihak yang terlibat menemukan jalan damai dan konstruktif untuk menyelesaikan masalah. Disamping tindakan kuratif di atas, langkah-langkah preventif dapat dikembangkan dengan menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin antar penganut agama yang berbeda untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan. Dorong pertemuan informal dan kegiatan bersama antara penganut agama yang

berbeda untuk membangun hubungan personal yang kuat. Kolaborasi dalam proyek kemanusiaan atau kegiatan sosial bersama dapat memperkuat rasa persaudaraan.

7. Mendorong Pendidikan Agama yang Moderat:

Pejabat GBI dapat memastikan bahwa pendidikan agama di gereja mereka mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moderasi beragama. Ini termasuk mempromosikan studi dan diskusi tentang teologi yang mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Berbagi pesan toleransi, cinta kasih, dan saling pengertian melalui tindakan nyata dapat membantu memperkuat rasa harmoni antaragama.

Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pejabat GBI dioptimalkan untuk mendorong pendidikan agama yang moderat dengan beberapa langkah strategi praktis untuk mendorong pendidikan agama yang moderat (1) memastikan bahwa kurikulum pendidikan agama mencakup berbagai perspektif agama dan memberikan penekanan pada nilai-nilai moderat, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. (2) pelatihan kepada guru agama untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengajarkan materi agama secara moderat dan inklusif. (3) mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis teks agama, sehingga mereka dapat memahami dan mengartikan ajaran agama dengan bijak. (4) menyelenggarakan diskusi kelas yang terbuka dan mendukung tentang agama dan kepercayaan berbeda. Ajarkan siswa untuk mendengarkan dan menghormati pandangan orang lain. (5) mengajak orangtua dan anggota masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan agama. Mereka dapat memberikan perspektif berharga dan mendukung nilai-nilai moderat di rumah dan dalam komunitas. (6) menyediakan buku-buku dan sumber daya yang mempromosikan pemahaman yang seimbang dan inklusif tentang agama. (7) guru dan pemimpin sekolah harus menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai toleransi, penghormatan, dan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. (8) bekerja sama

dengan komunitas keagamaan lokal untuk memastikan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah sejalan dengan nilai-nilai moderat yang dianut oleh komunitas tersebut.

8. Mengadvokasi Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia:

Pejabat GBI juga dapat berperan dalam memadvokasi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Mereka dapat mengajar umatnya untuk peduli terhadap isu-isu sosial dan berpartisipasi dalam upaya untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Secara aktif mempelajari, mengetahui hukum dan kebijakan yang berlaku terkait dengan kebebasan beragama dan penerapan-penerapan teknis di lingkungan masyarakat.

Melalui peran-peran ini, Pejabat GBI dapat menjadi agen perubahan positif dalam membangun masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan harmonis di dalam dan di luar gereja.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah:

1. Pertama, para Pejabat GBI harus memahami makna dan tujuan moderasi beragama dalam kerangka bernegara, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama sejalan dengan peran Gereja Bethel Indonesia sebagai organisasi keagamaan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam tata gereja GBI.
2. Kedua, para Pejabat Gereja Bethel Indonesia berperan dalam mendorong dan mensosialisasikan moderasi beragama, baik dalam khotbah kepada jemaat gereja, tetapi juga dalam komunikasi dan perbincangan sehari-hari dengan anggota masyarakat, serta dalam menjaga nilai-nilai. Bhinneka Tunggal Ika dengan persatuan dan mengingat perbedaan yang ada, membantu seluruh warga Gereja dan masyarakat untuk memahami perbedaan tersebut adalah harta bangsa, sebagai wujud nyata peran seorang pendeta dan wujud Garam dan Terang dunia.
3. Ketiga, mengembangkan budaya inklusif sebagai budaya bangsa Indonesia melalui tindakan-tindakan

spesifik seperti: kegiatan bersama masyarakat, komunikasi aktif, kegiatan sosial bersama masyarakat, membina hubungan dengan umat beragama lain, karena nilai-nilai moderasi beragama yang selaras dengan nilai – nilai Kerajaan Allah yang perlu dikembangkan dan dipelihara.

KEPUSTAKAAN

- (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. "Kamus Bahasa Indonesia Edisi Elektronik." Pusat Bahasa.
2008. <https://kbbi.web.id/moderasi>.
- Ali Muhtarom & Sahlul Fuad (eds.). 2020. *MODERASI BERAGAMA Konsep - Nilai Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*. Edited by November 2020 Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Talibun Nusantara.
- Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia. 2021. "Tata Gereja GBI (Edisi 2021)." Jakarta: BPP GBI.
- Departemen Teologi Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia. 2018. *Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia*. Edited by Rubin Adi Abraham. Cetakan I. Jakarta: Departemen Teologi Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia.
- Etnasari Anjaya, Carolina, and Yonatan Alex Arifianto. 2021. "Mengembangkan Misi Gereja Dalam Bingkai Moderasi Beragama." *Jurnal Teologi Kristen Thronos* 3 (1): 1–10. konteks misi; moderasi beragama; misi gereja; misi; perdamaian.
- GBI, BPH. 2014. *Tata Gereja - Gereja Bethel Indonesia*. Edisi 2014. Jakarta: BPH Gereja Bethel Indonesia.
- Harmadi, Mariani. 2019. "Metafora 'Meja Makan' Sebagai Upaya Membangun Toleransi Di Tengah Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Majemuk." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4 (1): 99–110. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.193>.
- Hendriani, Aan, Achmad Maulidin, Ahmad Royani, Ahmad Suherman, and Agus Nurasikin. 2021. *Moderasi Beragama Dalam Masyarakat*

- Multikultural*. Edited by Sos.M. Si Muhibuddin, S. Ke-1. Banten: Media Karya Kreatif.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama RI. 2020. *RENCANA STRATEGIS*. <https://cms.kemenag.go.id/storage/files/shares/files/RENSTRA KEMENAG 2020-2024 Ok.pdf>.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2023. "PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA." Jakarta.
- Kepri, Polda. 2023. "Mediasi Polisi : Hasilkan Kesepakatan Damai Antar Umat Agama, Dalam Kasus Perusakan Bangunan Peribadatan Di Batam Kepri." *Humas Polda Kepri*, 2023. <https://humas.polri.go.id/2023/08/12/mediasi-polisi-hasilkan-kesepakatan-damai-antar-umat-agama-dalam-kasus-perusakan-bangunan-peribadatan-di-batam-kepri/>.
- Kompas.com. 2023. "Perusakan Bangunan Gereja Di Batam Berakhir Damai, Polisi: Konflik Lahan, Bukan Agama." KOMPAS. 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/12/122533778/perusakan-bangunan-gereja-di-batam-berakhir-damai-polisi-konflik-lahan>.
- LAI. 1997. *Alkitab Terjemahan Baru (TB)*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Nolan, Albert. 2009. *Jesus Today: Spiritualitas Kebebasan Radikal*. Yogyakarta: Kanisius.
- RI, Lemhanas. 2020. "Menteri Agama RI: Nilai Dalam Sila-Sila Pancasila Sejalan Dengan Ajaran Semua Agama." 2020. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/835-menteri-agama-ri-nilai-dalam-sila-sila-pancasila-sejalan-dengan-ajaran-semua-agama>.
- Sekretariat Badan Pengurus Daerah Kepulauan Riau Gereja Bethel Indonesia. 2020. "Sejarah Gereja Bethel Indonesia Di Kepulauan Riau." Batam.
- Setyobekti, Andreas Budi, Susanna Kathryn, and Suwondho Sumen. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di DKI Jakarta." *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)* 4 (1): 1–10. <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.29>.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Edited by Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta.
- Waruwu, Mesirawati, Christian Pungky Wijanarko, and Mariani Harmadi. 2022. "The Role of Multiple Christian Religious Education in Building Multicultural Community Unity | GRAFTA: Journal of Christian Religion Education and Biblical Studies." *GRAFTA: Journal of Christian Religion Education and Biblical Studies* 1 (2): 124–37. <https://grafa.stbi.ac.id/index.php/GR AFTA/article/view/19>.
- Winarno. 2019. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.